



Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Penumbuhan Budi Pekerti Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMPN) Negeri Se-Kota Tasikmalaya

Irpan

Program Pascasarjana STIA YPPT Priatim Tasikmalaya
e-mail: Masih.4irpan@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini menganalisis implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti pada siswa SMPN di Kota Tasikmalaya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, observasi, dan wawancara mendalam. Analisis data dilakukan dengan proses reduksi data, display data, verifikasi, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ini dapat berhasil dengan memperhatikan standar dan sasaran kebijakan, optimalisasi sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, sikap para pelaksana, komunikasi antar organisasi terkait, serta kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Studi ini memberikan wawasan yang mendalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan tersebut di Kota Tasikmalaya.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, SMPN Se-Kota Tasikmalaya

PENDAHULUAN

Pendidikan tidak hanya bertujuan untuk mengembangkan kecerdasan intelektual semata, tetapi juga untuk membentuk karakter siswa melalui pembinaan budi pekerti yang baik. Sebuah sistem pendidikan yang komprehensif tidak hanya fokus pada pengetahuan akademis, tetapi juga pada nilai-nilai moral, etika, dan kejujuran. Melalui pengajaran tentang kebaikan, kerja sama, serta menghormati nilai-nilai kemanusiaan, siswa dapat belajar bagaimana bertindak dengan bijaksana dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-harinya. Hal ini mempersiapkan agar tidak hanya untuk sukses secara akademis, tetapi juga untuk menjadi warga yang berkontribusi positif dalam masyarakat, dengan integritas dan empati yang kuat terhadap sesama.

Budi pekerti bagi seorang siswa merujuk pada perilaku dan sikap moral yang mencerminkan nilai-nilai kebaikan, kejujuran, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap diri sendiri serta orang lain. Budi pekerti yang baik tercermin melalui sikap sopan santun, rasa hormat kepada guru dan teman, kedisiplinan dalam menjalankan tugas-tugas sekolah, serta kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Dalam konteks pendidikan, budi pekerti tidak hanya membentuk karakter individu yang berakhlak mulia, tetapi juga penting dalam menciptakan suasana belajar yang kondusif dan harmonis. Pengembangan budi pekerti pada siswa diharapkan dapat menghasilkan generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki integritas moral yang tinggi dan siap berkontribusi positif bagi masyarakat.

Memiliki budi pekerti yang baik sangat penting bagi siswa di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) karena masa ini merupakan fase kritis dalam pembentukan karakter dan kepribadiannya. Budi pekerti yang baik membantu siswa mengembangkan sikap positif, seperti rasa hormat, tanggung jawab, dan empati, yang sangat diperlukan dalam interaksi sosialnya sehari-hari. Sikap-sikap ini tidak hanya menciptakan lingkungan belajar yang harmonis dan kondusif, tetapi juga membekali para siswa dengan nilai-nilai moral yang akan berguna sepanjang hidupnya.

Selain hal tersebut di atas, budi pekerti yang baik mendorong perilaku disiplin dan kerja keras, yang merupakan kunci sukses dalam akademis maupun kehidupan pribadi. Dengan memiliki dasar moral yang kuat, siswa akan lebih mampu menghadapi tantangan dan mengambil keputusan yang tepat di masa depan. Pendidikan budi pekerti juga membantu mengurangi masalah sosial seperti perundungan dan kenakalan remaja, yang sering muncul pada usia ini. Dengan demikian, pengembangan budi pekerti yang baik di kalangan siswa SMP bukan hanya membentuk individu yang bermoral tinggi, tetapi juga berkontribusi pada masyarakat yang lebih baik dan harmonis.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti memberikan penekanan pada pembentukan lingkungan sekolah yang kondusif dan membangkitkan inspirasi bagi seluruh komunitas pendidikan, termasuk siswa, guru, dan tenaga kependidikan. Tujuan utamanya adalah menanamkan sikap dan perilaku positif yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila melalui kebiasaan yang dibangun di lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Implementasi pendidikan karakter ini diharapkan menjadi sebuah gerakan bersama yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan keluarga sebagai mitra utama. Kegiatan Penumbuhan Budi Pekerti

dimulai sejak awal tahun ajaran dengan beragam kegiatan yang dilakukan secara harian, mingguan, dan tahunan. Selain itu, peraturan ini juga mencakup sistem pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program oleh pemerintah dan pemerintah daerah, dengan pendanaan yang berasal dari berbagai sumber termasuk APBN, APBD, dan dana publik lainnya yang sah.

Setiap kebijakan atau peraturan yang dibuat oleh pemerintah harus dirancang sedemikian rupa sehingga dapat diimplementasikan dengan baik untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Implementasi yang baik memerlukan pertimbangan matang terhadap berbagai aspek, termasuk sumber daya yang tersedia, kesiapan lembaga yang bertanggung jawab, dan penerimaan masyarakat. Kebijakan yang tidak dapat diimplementasikan dengan efektif berisiko menjadi sekadar dokumen tanpa dampak nyata, menghambat kemajuan dan perubahan yang diharapkan, sehingga pemerintah perlu memastikan bahwa setiap kebijakan didukung oleh rencana pelaksanaan yang jelas, mekanisme pengawasan yang efektif, serta evaluasi berkala untuk menilai keberhasilannya dan melakukan penyesuaian yang diperlukan. Dengan demikian, kebijakan yang dibuat dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan berkontribusi terhadap pembangunan yang berkelanjutan.

Istilah kebijakan (Wahab, 2008) menyatakan: “*Policy* itu adalah suatu tindakan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu dan bukan sekedar keputusan untuk melakukan sesuatu”. Pada umumnya kebijakan merupakan serangkaian prinsip, aturan, dan tindakan yang dirumuskan oleh otoritas tertentu, seperti pemerintah atau organisasi, dengan tujuan untuk mencapai tujuan tertentu. Kebijakan biasanya dibuat berdasarkan analisis mendalam mengenai isu-isu yang ingin diatasi atau tujuan yang ingin dicapai, serta mempertimbangkan berbagai aspek seperti hukum, ekonomi, sosial, dan budaya. Implementasi kebijakan melibatkan koordinasi antara berbagai pihak yang terlibat dan pemantauan terhadap pelaksanaannya untuk memastikan efektivitas dan efisiensi.

Sementara istilah kebijakan publik menurut Eyestone (Winarno, 2012) menyatakan: “Kebijakan publik sebagai hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya”. Kebijakan publik pada umumnya merupakan keputusan atau tindakan yang diambil oleh pemerintah atau otoritas yang berwenang untuk mempengaruhi atau mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat. Tujuan dari kebijakan publik bisa bermacam-macam, mulai dari meningkatkan kesejahteraan sosial, mengatur ekonomi, melindungi lingkungan, hingga mempromosikan keadilan dan keamanan.

Proses pembuatan kebijakan publik melibatkan analisis mendalam terhadap masalah atau isu yang ingin diselesaikan, penelitian terhadap berbagai opsi solusi yang mungkin, konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan, dan akhirnya pengimplementasian serta evaluasi terhadap keberhasilan kebijakan tersebut. Woll (Tangkilian, 2005) menyatakan: “Kebijakan publik ialah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat”.

Sementara Dye (Kusnandar, 2012) menyatakan: “Kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan”. Keberhasilan dalam mengimplementasi suatu kebijakan menurut Meter dan Horn (Agustino, 2008) dapat dilihat dari; “Standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, sikap para pelaksana, komunikasi antar organisasi terkait kegiatan-kegiatan pelaksanaan dan lingkungan sosial, ekonomi dan politik”. Pelaksanaan kebijakan adalah proses yang rumit yang melibatkan berbagai elemen penting. Standar dan target kebijakan menetapkan kriteria dan tujuan yang harus dicapai selama pelaksanaannya. Pencapaian target ini sering diukur menggunakan indikator kinerja untuk menilai hasil yang diharapkan. Sumber daya, baik dalam bentuk finansial maupun manusia, sangat penting dalam implementasi kebijakan karena mempengaruhi kemampuan organisasi pelaksana untuk menjalankan kebijakan tersebut.

Implementasi kebijakan pendidikan karakter disiplin di Madrasah Tsanawiyah Riyadhus Sholihin telah dilakukan melalui tahapan perencanaan yang terstruktur dan melibatkan rapat dewan guru serta staf, yang menunjukkan pendekatan yang komprehensif. Langkah awal mencakup integrasi nilai-nilai karakter dalam kurikulum sekolah yang disosialisasikan kepada wali siswa pada awal tahun ajaran. Selain itu, kebijakan ini juga terintegrasi dalam kegiatan pengembangan diri melalui berbagai aktivitas, serta dalam proses pembelajaran dengan penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang mendukung aktualisasi nilai-nilai karakter. Penggunaan nilai-nilai tersebut juga tercermin dalam budaya sekolah, yang tercermin dalam peraturan kelas, peraturan sekolah, dan kegiatan ekstrakurikuler (Tamam, 2021).

Implementasi pendidikan karakter dalam pembelajaran tematik di kelas IV pada tiga sekolah berbeda, yang melibatkan tiga tahap utama: perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Setiap sekolah mengintegrasikan nilai-nilai karakter yang unik sesuai dengan identitasnya, termasuk visi, misi, dan tujuan pendidikan. Namun, kendala seperti keterbatasan sarana dan prasarana, variasi kondisi siswa, pengalaman guru yang beragam, dan kurangnya komunikasi antara sekolah dan orang tua siswa menjadi tantangan yang perlu diatasi. Solusi yang diusulkan mencakup optimalisasi penggunaan sarana dan prasarana, pemberian perhatian khusus kepada siswa yang membutuhkan bimbingan tambahan, efisiensi waktu pembelajaran, serta peningkatan komunikasi melalui pertemuan rutin dengan orang tua siswa. Hasil observasi terhadap nilai karakter siswa mencerminkan penekanan yang diberikan oleh masing-masing sekolah, sejalan dengan visi, misi, dan tujuannya serta materi yang disampaikan dalam pembelajaran tematik (Irma, 2020).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pendidikan karakter di MIN 2 Sleman terdiri dari dua tingkatan utama. Pertama, kepala madrasah mengintegrasikan perencanaan karakter dalam visi dan misi sekolah, sementara guru merancang pendidikan karakter dalam pembelajaran. Kedua, kepala madrasah bertindak sebagai pemimpin dalam merancang, mengorganisir, dan mengawasi program tersebut, dengan guru bertanggung jawab atas pelaksanaannya, termasuk transfer nilai dan peran sebagai teladan. Peran pegawai sekolah penting dalam menyediakan sarana. Nilai-nilai karakter seperti religiusitas, kejujuran, dan tanggung jawab dikembangkan melalui mata pelajaran dan ekstrakurikuler, didukung oleh visi madrasah, komitmen kepala madrasah, dan partisipasi masyarakat. Hambatan yang dihadapi meliputi

manajerial madrasah yang belum optimal, perbedaan persepsi, dan dampak media elektronik yang berkembang pesat (Ngadiyono, 2017).

Penelitian mengenai pendidikan karakter bagi siswa di sekolah sangatlah penting karena memiliki peran mendasar dalam pembentukan karakter generasi muda. Melalui pendidikan karakter, siswa diajarkan nilai-nilai moral, etika, dan perilaku positif yang menjadi dasarnya dalam berinteraksi dengan lingkungan sosial dan menghadapi berbagai tantangan hidup. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi metode pengajaran yang paling efektif serta memahami pengaruh berbagai faktor seperti lingkungan keluarga, media, dan masyarakat terhadap perkembangan karakter siswa. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan wawasan bagi para pendidik dan pembuat kebijakan dalam merancang kurikulum yang tidak hanya berfokus pada aspek akademis, tetapi juga pada pengembangan kepribadian yang seimbang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan, yang meliputi observasi dan wawancara mendalam. Informan dalam penelitian ini adalah semua pihak yang terlibat dalam implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti Siswa SMPN di Kota Tasikmalaya. Data dianalisis melalui teknik reduksi untuk menyaring informasi yang tidak relevan, penyajian data untuk menata dan menampilkan temuan, serta verifikasi dan penarikan kesimpulan untuk memastikan keabsahan dan relevansi hasil penelitian. Metode ini dirancang untuk mengkaji dan memahami implementasi peraturan tersebut dari perspektif partisipan langsung dan pihak-pihak terkait.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data penelitian, terdapat 21 SMP Negeri di wilayah tersebut dengan total 18.173 siswa yang dibagi dalam 582 rombongan belajar. SMP Negeri 1 dan SMP Negeri 2 memiliki jumlah siswa terbanyak, masing-masing 1.085 dan 1.081 siswa, serta 33 rombongan belajar. Di samping itu, SMP Negeri 18 menampilkan jumlah siswa paling sedikit, yakni 323 siswa yang terbagi dalam 12 rombongan belajar. SMP Negeri 5 mencatatkan jumlah guru terbanyak dengan 54 orang, sedangkan SMP Negeri 18 memiliki jumlah guru terendah, yaitu 22 orang. Adapun SMP Negeri 8 memimpin dalam jumlah tenaga pendidik dengan 15 orang, yang merupakan jumlah tertinggi di antara sekolah lainnya, sementara SMP Negeri 7 dan SMP Negeri 18 memiliki jumlah tenaga pendidik paling sedikit, yaitu 6 orang untuk masing-masing sekolah. SMP Negeri 11 dan SMP Negeri 14 memiliki fasilitas ruang kelas terbanyak, masing-masing dengan 35 ruang, sedangkan SMP Negeri 18 memiliki jumlah ruang kelas paling sedikit, hanya 14 ruang. Secara keseluruhan, terdapat 875 guru, 209 tenaga pendidik, dan 608 ruang kelas di 21 SMP Negeri ini.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti bertujuan untuk menciptakan lingkungan pendidikan positif dan mendukung bagi siswa, guru, serta tenaga kependidikan di Indonesia. Peraturan ini didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan bertujuan untuk mengintegrasikan pembiasaan sikap dan perilaku positif sebagai bagian integral dari proses pendidikan di semua jenjang sekolah, mulai dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas dan kejuruan.

Tujuan utama dari peraturan tersebut adalah menjadikan sekolah sebagai lingkungan belajar yang menyenangkan dan inspiratif bagi semua pihak terkait, termasuk siswa, guru, dan tenaga kependidikan, serta memperkuat pembentukan karakter positif melalui pembiasaan baik yang dimulai sejak awal masa orientasi peserta didik baru hingga kelulusan. Melibatkan semua stakeholder, termasuk pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan orang tua, dalam gerakan bersama untuk membangun karakter siswa yang baik, dan menciptakan lingkungan belajar yang harmonis antara sekolah, masyarakat, dan keluarga, juga menjadi tujuan utama.

Kelahiran peraturan mengenai budi pekerti diharapkan dapat menjadi tonggak penting dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Dengan memasukkan Pendidikan Berkarakter Positif (PBP) sebagai bagian integral dari kegiatan pendidikan, harapannya adalah menciptakan generasi muda yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki nilai-nilai moral dan etika yang kokoh. Implementasi PBP diharapkan dapat menciptakan perubahan positif dalam perilaku siswa, dengan membentuk kebiasaan baik yang terinternalisasi serta menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Hal ini tidak hanya akan mendukung pengembangan kepribadian siswa secara menyeluruh, tetapi juga mempersiapkannya untuk menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan berintegritas di masa depan.

Implementasi kebijakan tentang Penumbuhan Budi Pekerti di SMPN se-Kota Tasikmalaya, yang bertujuan meningkatkan karakter moral dan etika siswa, melibatkan penetapan standar dan sasaran serta ukuran dan tujuan kebijakan. Hal ini penting untuk memastikan sekolah mematuhi kriteria moral, etika, dan perilaku yang diharapkan dari siswa sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015. Kebijakan ini juga menetapkan parameter untuk mengevaluasi keberhasilan implementasi, seperti peningkatan nilai kejujuran, kerjasama, dan disiplin di kalangan siswa.

Namun, tantangan terjadi dalam implementasi karena tingkat kepatuhan terhadap standar kebijakan yang masih perlu ditingkatkan, terutama akibat kurangnya pemahaman dan dukungan dari masyarakat. Diperlukan keterlibatan aktif dari orang tua dan komunitas untuk mendukung upaya sekolah mencapai tujuan pembiasaan sikap dan perilaku positif yang diinginkan. Selain itu, koordinasi yang lemah antara sekolah dan Dinas Pendidikan juga menghambat pelaksanaan kebijakan secara optimal. Untuk mengatasi ini, diperlukan perbaikan dalam komunikasi dan strategi implementasi yang lebih terintegrasi guna mencapai tujuan kebijakan dengan efektif. Masalah lain yang dihadapi adalah keterbatasan sumber daya, khususnya dalam hal anggaran untuk pelatihan guru. Peningkatan alokasi dana untuk pelatihan dan pengembangan kapasitas guru menjadi krusial agar dapat menanamkan budi pekerti dengan baik pada siswa.

Keberhasilan implementasi kebijakan ini tidak hanya bergantung pada upaya sekolah, tetapi juga memerlukan dukungan dan keterlibatan dari berbagai pihak, termasuk orang tua, komunitas, serta penguatan koordinasi antara berbagai instansi terkait. Hasil penelitian masih kurangnya kesadaran masyarakat, terutama orang tua siswa, tentang pentingnya pembentukan karakter di sekolah, menjadi tantangan utama. Dukungan yang minim dari orang tua juga menjadi penghambat dalam mencapai hasil yang diharapkan. Selain itu, struktur birokrasi yang kompleks dan lambat dalam pengambilan keputusan juga menghambat efektivitas implementasi kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dalam sistem pengambilan keputusan agar lebih responsif terhadap kebutuhan di lapangan.

Keterlibatan Komite Sekolah dan masyarakat dalam menyusun serta menjalankan program penumbuhan budi pekerti juga belum optimal. Kurangnya komunikasi yang efektif antara komite sekolah dan pihak Dinas Pendidikan telah menyebabkan banyak inisiatif yang tidak terealisasi dengan baik. Komunikasi yang lebih intensif dan dukungan konkret diperlukan untuk memastikan pelaksanaan kebijakan ini berjalan dengan baik. Selain itu, siswa sering merasa bahwa program penumbuhan budi pekerti tidak memiliki makna yang jelas dalam kehidupan sehari-harinya, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih menarik dan relevan untuk meningkatkan pemahaman dan penerapan nilai-nilai budi pekerti.

Secara keseluruhan, penelitian ini mengungkapkan bahwa meskipun tujuan kebijakan penumbuhan budi pekerti sangat relevan untuk membentuk karakter positif siswa, implementasinya masih menghadapi banyak tantangan. Kesuksesan implementasi kebijakan ini memerlukan kolaborasi yang lebih erat antara sekolah, orang tua, komite sekolah, dan pihak Dinas Pendidikan. Untuk mencapai tujuan kebijakan secara efektif, diperlukan peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat, perbaikan komunikasi dan koordinasi, serta peningkatan alokasi sumber daya untuk pelatihan dan pengembangan kapasitas guru. Upaya ini akan memastikan bahwa nilai-nilai moral dan etika yang diajarkan di sekolah dapat diterapkan dengan efektif dalam kehidupan sehari-hari siswa, sehingga tujuan kebijakan penumbuhan budi pekerti dapat tercapai secara maksimal di Kota Tasikmalaya.

Implementasi kebijakan penumbuhan budi pekerti di SMP Negeri Kota Tasikmalaya menghadapi sejumlah tantangan signifikan. Aspek sumber daya, baik fisik maupun manusia, menjadi elemen kunci yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan ini. Sumber daya fisik seperti infrastruktur sekolah yang memadai sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, sementara ketersediaan sumber daya manusia yang terlatih, terutama guru dengan keterampilan yang tepat, menentukan efektivitas penanaman nilai-nilai budi pekerti pada siswa.

Tantangan utama meliputi kurangnya koordinasi antar organisasi, terutama antara SMPN dan Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, serta keterbatasan sumber daya untuk pelatihan dan pengembangan kapasitas guru. Selain itu, kompleksitas birokrasi dan kurangnya dukungan dari lingkungan sosial, seperti kesadaran masyarakat akan pentingnya budi pekerti di sekolah, juga menjadi hambatan yang perlu diatasi. Upaya perlu dilakukan untuk memperkuat struktur organisasi, meningkatkan koordinasi antarpihak terkait, serta mengalokasikan sumber daya yang memadai untuk mendukung implementasi kebijakan ini. Pelibatan aktif semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, sekolah, guru, orang tua siswa, dan masyarakat, menjadi krusial dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang mendukung perkembangan karakter positif pada siswa sesuai dengan visi kebijakan yang diamanatkan.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian, faktor-faktor kunci yang berpengaruh pada keberhasilan implementasi peraturan ini mencakup standar dan sasaran kebijakan yang jelas, ketersediaan sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, sikap pelaksana terhadap peraturan, komunikasi antar organisasi terkait kegiatan pelaksanaan, serta kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik di sekitarnya. Untuk mencapai implementasi yang efektif, diperlukan sinergi yang baik antara faktor-faktor tersebut agar tujuan penumbuhan budi pekerti siswa dapat tercapai secara optimal di SMPN se-Kota Tasikmalaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2008). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta.
- Irma Sofiasyari, 2020. Implementasi Pendidikan Karakter Dalam Pembelajaran Tematik di Kelas IV Sekolah Dasar Kota Semarang. Pascasarjana Universitas Negeri Semarang.
- Kusnandar, I. (2012). *Analisis Kebijakan Publik*. Multazam.
- Ngadiyono, 2017. Implementasi Pendidikan Karakter di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Sleman Yogyakarta. Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta.
- Tamam, 2021. Implementasi Kebijakan Pendidikan Karakter Disiplin di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Riyadhus Sholihin Megang Sakti Musi Rawas, Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
- Tangkilisan, H. N. S. (2005). *Manajemen Publik*. Gramedia.
- Wahab, A. S. (2008). *Analisis Kebijaksanaan, Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Bumi Aksara.
- Winarno, B. (2012). *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus*. CAPS.